

Panorama Kitab Hukum Kanonik (Tinjauan Tempat, Peran dan Fungsi di dalam Gereja Katolik)

Nikodemus

STFT Widya Sasana Malang
nikodemuspangareho@gmail.com

Yohanes Endi

STFT Widya Sasana Malang
yohanesendi82@gmail.com

Alamat ; Jl. Terusan Rajabasa No.2, Pisang Candi, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65146

Korespodensi email : nikodemuspangareho@gmail.com

Abstrak

The focus of this study is to understand the Book of Canon Law as the internal legal basis of the Catholic Church which regulates ecclesiastical governance and discipline. In the context of its place, the Book of Canon Law has a central role as an instrument that regulates various aspects of ecclesiastical life, from hierarchical organization to liturgy. Its role extends beyond administrative boundaries, making it an important guide in carrying out pastoral duties and maintaining ecclesiastical discipline. The role of the Book of Canon Law is not only limited to internal ecclesiastical aspects, but also influences the church's relationship with wider society. This book reflects the role of the church in regulating the spiritual and moral life of Catholics and maintaining doctrinal integrity. The function of the Code of Canon Law is also to facilitate conflict resolution and uphold justice among church members. The author uses descriptive analysis methods and the Book of Canon Law as a scalpel to explain the contents of the article that will be discussed. In the midst of dynamic social and cultural change, the Code of Canon Law becomes relevant in interpreting and applying moral and ethical principles, which are appropriate in the contemporary context. The harmony between these principles and the challenges of modern times is an integral part of the role and function of the Code of Canon Law in maintaining the identity and mission of the Catholic Church.

Keywords; Code of Canon Law, Ecclesiastical governance, Central role, Church-society relations and Moral principles.

Abstrak

Fokus studi ini adalah memahami Kitab Hukum Kanonik sebagai landasan hukum internal Gereja Katolik yang mengatur tata kelola dan disiplin gerejawi. Dalam konteks tempatnya, Kitab Hukum Kanonik memiliki peran sentral sebagai instrumen yang mengatur berbagai aspek kehidupan gerejawi, mulai dari organisasi hierarki hingga liturgi. Perannya yang melampaui batas administratif membuatnya menjadi pedoman penting dalam menjalankan tugas pastoral dan memelihara disiplin gerejawi. Peran Kitab Hukum Kanonik tidak hanya terbatas pada aspek internal gerejawi, tetapi juga mempengaruhi hubungan gereja dengan masyarakat luas. Kitab ini mencerminkan peran gereja dalam mengatur kehidupan rohani dan moral umat Katolik serta menjaga integritas doktrinal. Fungsi Kitab Hukum Kanonik juga memfasilitasi resolusi konflik dan menegakkan keadilan di antara anggota gereja. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dan Kitab Hukum Kanonik sebagai pisau bedah untuk menjelaskan isi artikel yang akan dibahas. Di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya, Kitab Hukum Kanonik menjadi relevan dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip moral dan etika, yang sesuai dalam konteks kontemporer. Keselarasan antara prinsip-prinsip tersebut dengan tantangan zaman modern menjadi bagian integral dari peran dan fungsi Kitab Hukum Kanonik dalam menjaga identitas dan misi gereja Katolik.

Kata Kunci; Kitab Hukum Kanonik, Tata kelola gerejawi, Peran sentral, Hubungan gereja-masyarakat dan Prinsip-prinsip moral.

PENDAHULUAN

Pada 25 Januari 1983 Paus Yohanes Paulus II mempromulgasikan Kitab Hukum Kanonik (KHK) baru yang berlaku efektif sejak Minggu 1 Adven tahun yang sama (27 November 1983). Kitab Hukum Kanonik, yang dikenal sebagai *Corpus Iuris Canonici* dalam bahasa Latin, merupakan salah satu fondasi hukum internal yang sangat penting dalam Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik ini bukan hanya sekadar kumpulan aturan dan hukum gerejawi, serta sebagai landasan yang mengatur tata kelola dan disiplin gerejawi secara menyeluruh. Dalam konteks Gereja Katolik, Kitab Hukum Kanonik memainkan peran sentral dalam membentuk struktur dan fungsi hierarkis serta memandu berbagai aspek kehidupan gerejawi, termasuk liturgi, penyelesaian konflik, dan pengaturan hubungan dengan masyarakat non-Katolik.

Peran Kitab Hukum Kanonik sebagai “Undang-undang Disiplin Suci” yang menjalankan tugas pastoral dan memelihara disiplin di dalam Gereja Katolik. Dalam naskah-naskahnya Konsili mengemukakan Gereja sebagai sakramen keselamatan universal (bdk. Konstitusi *Lumen Gentium* art. 1, 9, 48), sebagai Umat Allah, yang susunan hirarkinya bersandar pada Kolegium para Uskup yang bersatu dengan kepalanya. Maka sebagai pedoman utama, Kitab Hukum Kanonik memberikan arahan yang jelas bagi para pemimpin gerejawi dalam mengambil keputusan dan mengelola kegiatan gerejawi sehari-hari. Dengan demikian, Kitab Hukum Kanonik bukan hanya menjadi alat administratif, tetapi juga merupakan instrumen yang mendasar dalam mempertahankan ajaran dan tradisi gerejawi.

Peran Kitab Hukum Kanonik tidak hanya terbatas pada urusan internal Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan gereja dengan masyarakat non-Katolik. Hubungan ini diatur oleh, Kan. 22 Undang-undang sipil yang dirujuk oleh hukum Gereja harus ditepati dengan efek-efek yang sama dalam hukum kanonik, sejauh tidak bertentangan dengan hukum ilahi, dan kecuali ditentukan lain oleh hukum kanonik. Melalui ketentuannya yang telah tertulis di dalam Kitab Hukum Kanonik, mencerminkan peran gereja yang mengatur kehidupan rohani dan moral umat Katolik serta menjaga integritas doktrinal di tengah-tengah masyarakat yang beragam suku, budaya, ras dan agama.

Selain sebagai instrumen pengaturan dan pedoman pastoral, Kitab Hukum Kanonik juga memfasilitasi resolusi konflik dan menegakkan keadilan di antara anggota gereja. Dalam situasi di mana konflik timbul, Kitab Hukum Kanonik memberikan kerangka kerja yang jelas

dan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan masalah dengan adil dan proporsional, sehingga memperkuat hubungan antar anggota gereja dan menjaga kesatuan dalam tubuh gereja. Dengan demikian, dalam konteks dinamika sosial dan budaya yang terus berubah, penting untuk memahami peran dan fungsi Kitab Hukum Kanonik dalam menjaga identitas dan misi Gereja Katolik. Keselarasan antara prinsip-prinsip Kitab Hukum Kanonik dengan tantangan zaman modern menjadi esensial dalam memastikan bahwa Gereja Katolik tetap relevan dan mampu memenuhi panggilan Allah dan pastoralnya, dalam mengabdikan kepada umat Katolik dan masyarakat non-Katolik. Gereja harus menyambut dan menyesuaikan diri seperlunya dengan tawaran dan fasilitas yang diciptakan oleh rev. 4.0 untuk pelayanan yang semakin efektif dan *smart*, sumber daya manusia di dalam Gereja sendiri, baik imam maupun awam, semakin berkurang pelayanannya. Dari penjelasan ini, ingin mengajak gereja Katolik untuk membarui diri agar bisa berdamai dengan perkembangan zaman namun tidak meninggalkan aturan Kitab Hukum Kanonik.

Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana Kitab Hukum Kanonik memainkan peran sentral dalam membentuk struktur dan fungsi hierarkis di dalam Gereja Katolik, serta bagaimana hal ini mempengaruhi pengaturan liturgi dan penyelesaian konflik di dalam gereja? Apa kontribusi utama Kitab Hukum Kanonik dalam menjalankan tugas pastoral dan menjaga disiplin gerejawi, dan bagaimana hal ini mencerminkan perannya sebagai instrumen yang mendasar dalam mempertahankan ajaran dan tradisi gerejawi? Bagaimana Kitab Hukum Kanonik mempengaruhi hubungan antara Gereja Katolik dengan masyarakat non-Katolik melalui pengaturan moral dan etika, serta bagaimana hal ini mencerminkan peran gereja dalam mengatur kehidupan rohani dan moral umat Katolik di tengah-tengah masyarakat yang beragam?

METODE PENULISAN

Metode penulisan artikel ini terfokus pada pemahaman tentang Tempat, Peran dan Fungsi Kitab Hukum Kanonik di Dalam Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik sebagai dasar hukum internal Gereja Katolik yang mengatur tata kelola dan disiplin gerejawi. Pendekatan analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang memperjelas isi artikel dengan menggunakan Kitab Hukum Kanonik sebagai alat utama untuk penulisan artikel. Kitab Hukum Kanonik memiliki beberapa peran penting, di antaranya sebagai instrumen pengaturan yang memandu berbagai aspek kehidupan gerejawi seperti organisasi hierarkis dan liturgi, serta

sebagai pedoman krusial dalam menjalankan tugas pastoral dan menjaga disiplin gerejawi yang melampaui batas administratif. Selain itu, Kitab Hukum Kanonik juga memiliki dampak yang amat luas, tidak hanya mempengaruhi aspek internal gerejawi, tetapi juga hubungan gereja dengan masyarakat luas, sementara juga mencerminkan peran gereja dalam mengatur kehidupan rohani dan moral umat Katolik serta memfasilitasi penyelesaian konflik dan menegakkan keadilan di antara anggota gereja. Dalam konteks kontemporer, relevansi Kitab Hukum Kanonik termanifestasi dalam kemampuannya untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip moral yang abadi di tengah perubahan sosial dan budaya, serta dalam menjaga identitas dan misi gereja Katolik dengan memastikan keselarasan prinsip-prinsipnya dengan tantangan zaman modern-milenial. Oleh karena itu, metode penulisan artikel ini akan mengintegrasikan analisis deskriptif dengan pemanfaatan Kitab Hukum Kanonik sebagai instrumen utama untuk menjelaskan peran, fungsi, dan relevansi kontemporer dalam konteks gereja Katolik Latin.

ISI DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Isi Kitab Hukum Kanonik

Kitab Hukum, merupakan naskah utama perundangan Gereja yang bersandar pada warisan hukum dan perundangan Wahyu serta Tradisi, harus dipandang sebagai alat yang mutlak perlu agar terjaga tatanan yang semestinya, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup sosial serta dalam kegiatan Gereja itu sendiri. Dari penjelasan ini bahwa struktur dan isi Kitab Hukum Kanonik membahas tentang bagaimana hukum-hukum ditata dan diatur dengan baik. Penjelasan ini mencakup pengaturan serta penyusunan berbagai aturan dan ketentuan hukum yang mengikat dalam konteks Gereja Katolik Latin. Wewenang pelaksana merujuk pada otoritas atau kekuasaan yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan menegakkan hukum-hukum yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik.

Ketentuan normatif merujuk pada standar dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur tata cara liturgi, disiplin gerejawi, serta norma-norma moral dan etika yang diharapkan dari anggota Gereja Katolik. Ketetapan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi perilaku dan tindakan umat Katolik serta para pemimpin gerejawi. Atas dasar Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik adalah komunitas umat beriman berkat Baptisan yang diterimanya. Umat beriman Katolik ini berhimpun dalam komunitas-komunitas besar dan kecil, yang ditata secara organisatoris.

Sehingga membentuk suatu struktur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan di dalam gereja Katolik Latin.

Adaptasi dan revisi merujuk pada kemampuan Kitab Hukum Kanonik untuk berubah dan beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan dalam Gereja Katolik dan masyarakat pada umumnya. Ini mencakup proses penyesuaian aturan-aturan yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi saat ini, serta perubahan yang dilakukan terhadap hukum-hukum yang sudah ada untuk menjaga relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman. Proses adaptasi dan revisi ini penting untuk menjaga fleksibilitas dan aktualitas Kitab Hukum Kanonik sebagai panduan hukum internal Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik sebagai pegangan utama gereja Katolik Latin, maka penting bagi umat Katolik untuk melihat struktur dan memahami Kitab Hukum Kanonik. Mengapa demikian, karena Kitab Hukum Kanonik bukan hanya sebagai tatacara gereja Katolik Latin, tapi sebagai Kitab Hukum yang menghantarkan iman umat kepada Allah secara personal.

Tempat Kitab Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik

Hukum memperoleh fungsi dan perannya berdasarkan realitas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (*ubi societas ibi ius*) yakni sebagai instrumen yang membantu pembentukan kehidupan bersama yang teratur, terstruktur dan organis. Peran Kitab Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik menyoroti posisinya yang sentral dalam mengatur hukum gerejawi. Dalam konteks ini, Kitab Hukum Kanonik berfungsi sebagai kerangka hukum internal yang mengatur segala aspek kehidupan gerejawi, mulai dari liturgi hingga disiplin gerejawi. Perannya yang krusial mempengaruhi bagaimana Gereja Katolik diatur dan dijalankan secara organisatoris dan administratif.

Kitab Hukum Kanonik juga memainkan peran penting dalam menentukan tata kelola gereja. Ini mencakup penegakan hierarki dan struktur kepemimpinan di dalam Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik menetapkan tugas dan kewenangan para pemimpin gereja serta memberikan arahan tentang bagaimana pemimpin gereja harus menjalankan fungsi-fungsi yang sesuai dengan ajaran dan tradisi Gereja Katolik. Adanya relasi-relasi sosial antara individu maupun kelompok harus selaras dengan pengakuan fundamental bahwa setiap subjek memiliki kebebasan dalam proses menjadinya. Hal ini merupakan ciri hakiki dan mendasar dalam kehidupan bersama. Intervensi otoritatif kuasa tertentu melalui hukum positif dapat menjembatani proses harmonisasi relasi-relasi sosial yang ada demi mencegah terjadinya

dominasi subjek tertentu terhadap yang lain. Finalitas universal sebuah hukum adalah kebaikan atau kesejahteraan bersama (*bonum commune*).

Sebagai panduan hukum gerejawi, Kitab Hukum Kanonik menetapkan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan gerejawi. Ini mencakup tata cara liturgi, penyelesaian konflik internal, serta aturan-aturan moral dan etika yang diharapkan dari anggota Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik memberikan kerangka hukum yang jelas untuk perilaku dan tindakan yang diharapkan dari umat Katolik dan para pemimpin gereja. Dengan demikian Gereja pun perlu memiliki norma-norma positif khusus yang berfungsi mengatur jalinan relasi yang terjadi diantara umat beriman. Norma-norma positif tersebut dikenal sebagai Hukum Kanonik. Kitab Hukum Kanonik ini, yang membentuk gereja Katolik menjadi dewasa dalam menanggapi perkembangan zaman modern-milenial.

Penegakkan dalam konteks tata kelola gereja, Kitab Hukum Kanonik menegaskan kewenangan dan tanggung jawab otoritas gerejawi dalam mengelola Gereja Katolik. Hal ini mencakup pembentukan struktur organisasi gereja, pengangkatan pemimpin gereja, serta prosedur-prosedur administratif yang harus diikuti dalam menjalankan kegiatan gerejawi. Kitab Hukum Kanonik memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menjaga ketertiban dan disiplin dalam tubuh gereja. Tubuh gereja adalah bentuk yang kelihatan secara fisik dan menjadi patokan umat Katolik Latin untuk berhimpun, namun yang lebih penting lagi adalah membangun Gereja yang menjadi sarana antara hubungan manusia dan Allah.

Keterlibatan Kitab Hukum Kanonik dalam tata kelola gereja mencerminkan perannya yang luas dalam menegakkan ajaran dan tradisi Gereja Katolik. Kitab ini tidak hanya menjadi panduan dalam menegakkan hukum gerejawi, tetapi juga menjadi instrumen yang memastikan bahwa tata kelola gereja dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguh oleh Gereja Katolik. Dalam KGK. 1731 Prinsip moral dan etika ini tampak pada, kebebasan dan tanggung jawab manusia. Kebebasan adalah kemampuan yang berakar dalam akal budi dan kehendak, untuk bertindak atau tidak bertindak, untuk melakukan ini atau itu, supaya dari dirinya sendiri melakukan perbuatan dengan sabar. Dengan kehendak bebas, tiap orang dapat menentukan diri sendiri. Dengan kebebasannya, manusia harus tumbuh dan menjadi matang dalam kebenaran dan kebaikan. Kebebasan itu baru mencapai kesempurnaannya apabila diarahkan kepada Allah, kebahagiaan kita.

Peran Kitab Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik

Kitab Hukum Kanonik adalah kitab hukum Gereja yang mengatur pedoman hidup bersama iman umat dalam membangun *bonum commune* (kesejahteraan bersama). Kitab Hukum Kanonik memiliki peran penting sebagai panduan dalam tata kelola Gereja Katolik. Sebagai pedoman, Kitab Hukum Kanonik memberikan arahan yang jelas bagi para pemimpin gereja dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan dan mengatur kegiatan gerejawi sehari-hari. Ini membantu menjaga keteraturan dan efisiensi dalam struktur organisasi gereja serta memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran dan tradisi Gereja Katolik Latin.

Kitab Hukum Kanonik berperan dalam menjaga dan memperkuat kesatuan Gereja Katolik. Dengan memberikan kerangka hukum yang jelas, Kitab Hukum Kanonik membantu mencegah terjadinya perpecahan atau ketidaksepakatan di dalam Gereja Katolik. Ini mencakup penegakan disiplin gerejawi serta pengaturan hubungan antara anggota gereja untuk menjaga solidaritas dan persatuan dalam tubuh gereja. Peraturan yang dibuat dalam Kitab Hukum Kanonik adalah untuk mengatur tata tertib manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Tujuan yang akan dicapai adalah *communio* atau perkumpulan yang melahirkan relasi timbal balik antara anggota-anggota dengan Allah yang didasarkan pada iman dan cinta, tetapi juga diaplikasikan terhadap komunitas manusia.

Kitab Hukum Kanonik juga memberikan landasan bagi tindakan hukum Gereja Katolik. Ini mencakup pembentukan aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan gerejawi, seperti liturgi, penyelesaian konflik, dan moralitas umat Katolik. Dengan demikian, Kitab Hukum Kanonik memberikan kerangka hukum yang kokoh untuk memandu tindakan hukum yang diambil oleh gereja dalam menjalankan misi dan pelayanan rohani kepada umat Katolik. Kitab Hukum Kanonik sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, krisma dan lebih-lebih lagi cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman Kristiani, sebaliknya Hukum Kanonik bertujuan: terutama untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat Gerejawi yang memberi tempat utama pada cinta kasih, rahmat, krisma, namun sekaligus menumbuhkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu dengan baik dalam kehidupan masyarakat Gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalam gereja Katolik.

Peran Kitab Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik juga mencerminkan komitmen gereja dalam mempertahankan ajaran dan tradisi Katolik yang telah ada sejak zaman dahulu.

Dengan memberikan landasan hukum yang kuat, Kitab Hukum Kanonik membantu memastikan bahwa tindakan gereja selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguh oleh Gereja Katolik. Dalam keseluruhan, peran Kitab Hukum Kanonik sebagai pembimbing, memelihara kesatuan, dan penyedia landasan hukum dalam Gereja Katolik memainkan peran yang krusial dalam menjaga integritas dan identitas gereja Katolik.

Fungsi Kitab Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik

Fungsi Kitab Hukum Kanonik dalam Gereja Katolik melibatkan berbagai aspek penting, salah satunya adalah menegakkan disiplin gerejawi. Penting bagi umat Allah untuk mengetahui *canon* atau aturan yang sudah di promulgasi. KHK 1983 terdiri dari 1752 kanon. Jumlah kanon ini jauh berkurang jika dibandingkan dengan KHK 1917 yang diundangkan oleh Paus Benidiktus XV. Jumlah kanon KHK 1917 adalah 1414 kanon. Ke-1752 kanon KHK 1983 dibagi antara lain menjadi: 203 kanon mengatur tentang norma-norma umum; 18 kanon tentang kaum awam; 62 kanon mengatur tentang para imam; 38 kanon mengatur tentang otoritas tertinggi Gereja; 103 kanon mengatur tentang Tarekat Religius; 21 kanon mengatur tentang Tarekat Sekular; 16 kanon mengatur tentang Serikat Hidup Kerasulan; 30 kanon mengatur tentang sakramen baptis; 28 kanon mengatur tentang sakramen penguatan; 62 kanon mengatur tentang sakramen ekaristi; 39 kanon mengatur tentang sakramen tobat; 10 kanon mengatur tentang sakramen pengurapan orang sakit; 47 kanon mengatur tentang sakramen imamat; 111 kanon mengatur tentang sakramen perkawinan; 57 kanon mengatur tentang harta benda gerejawi; 353 kanon mengatur tentang hukum acara pengadilan.

Kitab Hukum Kanonik berperan sebagai pedoman yang jelas bagi tata kelola gerejawi, memberikan landasan hukum yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan ketaatan di antara anggota gereja. Ini mencakup penetapan aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan disiplin gerejawi dan menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam tubuh gereja. Adanya Kitab Hukum Kanonik bertujuan untuk mempermudah pencapaian kebaikan umat. Hukum Kanonik membantu komunitas kaum beriman Kristiani untuk menjadi dirinya atau menjadi orang Katolik yang sejati dalam karya Yesus Kristus dan menjadi saksi yang setia atas kehadiran Allah yang mencintai dan menjadi pelayan pada dunia zaman modern. Aturan disiplin Gereja ada untuk menolong iman manusia dalam pengembangan tugas-tugas utamanya di dunia. Gereja memiliki suatu tujuan yang sangat spiritual yaitu keselamatan para anggota, rekonsiliasi dan persekutuan dengan Allah. Selain menegakkan disiplin gerejawi, Kitab Hukum Kanonik juga mendorong keadilan dan kebenaran di dalam

Gereja Katolik. Dengan memberikan kerangka hukum yang adil dan proporsional, Kitab Hukum Kanonik membantu memastikan bahwa setiap anggota gereja diperlakukan dengan adil dan bahwa kebenaran ditegakkan dalam setiap tindakan hukum yang diambil oleh gereja.

Fungsi Kitab Hukum Kanonik juga mencakup menjaga dan melindungi hak dan kewajiban umat Katolik. Kitab Hukum Kanonik menetapkan aturan-aturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban umat Katolik dalam konteks kehidupan gerejawi. Dalam mengatur fungsi Kitab Hukum Kanonik maka badan hukum yang mengatur harus jelas dan mempunyai kekuatan hukum. Badan hukum adalah subjek dari hak dan kewajiban dari hukum Kanonik (Kan.113). Badan hukum ini didirikan oleh otoritas Gereja yang berwenang dengan sebuah dekret resmi (Kan. 116), yang mempunyai tujuan objektif demi kepentingan umum dan berkaitan langsung dengan misi Gereja (Kan. 114). Ada tiga elemen yang membentuk suatu badan hukum yakni elemen matrial, elemen formal, dan tujuan. Elemen yang dijelaskan mencakup hak-hak untuk menerima sakramen-sakramen gerejawi, hak-hak liturgis, dan hak-hak lainnya yang diberikan kepada umat Katolik oleh Gereja Katolik.

Sikap Gereja menjalankan fungsi dan menghadapi persoalan hak-hak asasi manusia dalam masyarakat luas cukup jelas, tetapi sikap Gereja sendiri terhadap hak-hak asasi umat beriman dalam konteks hidup menggereja. Secara singkat, Gereja memahami bahwa Gereja adalah komunitas umat beriman yang didirikan oleh Yesus sendiri, bukan oleh sekumpulan umat beriman sebagaimana diandaikan pada proses berdirinya suatu negara. Gereja pun lebih bersifat komunitarian, atau menekankan dimensi komunal, bukan individual. Kewajiban lebih ditekankan daripada hak. Maka dalam menjalankan fungsi-fungsinya, Kitab Hukum Kanonik membantu membentuk dan menjaga integritas serta identitas Gereja Katolik. Sebagai panduan yang berlandaskan prinsip-prinsip moral dan etika, Kitab Hukum Kanonik memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh gereja selaras dengan ajaran dan tradisi Katolik yang telah ada sejak zaman dahulu.

Secara teologis, Gereja memahami dirinya sebagai tubuh mistik Kristus. Artinya, Gereja (Katolik) adalah komunitas rohani. Meski begitu, di lain sisi Gereja adalah komunitas yang terdiri dari manusia yang konkret sehingga tak bisa mengelak dari arus waktu. Karenanya, Gereja juga menjadi anak zaman. Hal ini tampak dalam perkembangan ajaran-ajarannya, khususnya pandangan kosmologis (pandangan tentang dunia) dan antropologisnya (pandangan tentang manusia). Perkembangan pandangan tentang manusia ini pada akhirnya menjadi dasar sikap Gereja terhadap konsep hak-hak asasi manusia. Keseluruhannya, fungsi Kitab Hukum

Kanonik dalam Gereja Katolik sangat penting dalam menjaga keteraturan, keadilan, dan kebenaran di dalam tubuh gereja. Sebagai panduan yang mengatur tata kelola gerejawi, menegakkan disiplin, serta melindungi hak dan kewajiban umat Katolik, Kitab Hukum Kanonik membantu menjaga integritas dan identitas Gereja Katolik dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Tantangan dan Perubahan dalam Kitab Hukum Kanonik

Tantangan dan dinamika dalam Kitab Hukum Kanonik melibatkan sejumlah aspek penting, termasuk respons terhadap perubahan sosial dan budaya yang terus berlangsung. Dalam hal ini, Kitab Hukum Kanonik dihadapkan pada tuntutan untuk mempertimbangkan perubahan dalam norma dan nilai-nilai sosial serta budaya yang mempengaruhi kehidupan umat Katolik. Dengan demikian, Kitab Hukum Kanonik perlu memperhatikan dinamika yang ada dan menjawab tantangan-tantangan ini dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan ajaran Gereja Katolik. Tantangan dan perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi yang membuat gereja goyang, namun Gereja yang sesungguhnya adalah tubuh mistik Kristus itu sendiri.

Kitab Hukum Kanonik juga menghadapi tantangan dalam penegakkan hukum. Dengan berkembangnya berbagai bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap ajaran dan ketentuan gerejawi, Kitab Hukum Kanonik diuji dalam kapasitasnya untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih efektif untuk memastikan bahwa hukum-hukum dalam Kitab Hukum Kanonik ditegakkan dengan tegas dan proporsional. Kan. 2 menegaskan: “pada umumnya Kitab Hukum tidak menentukan ritus yang harus ditepati dalam perayaan-perayaan liturgis; karena itu, UU liturgis yang berlaku sampai sekarang tetap mempunyai kekuatan hukum, kecuali ada sesuatu dari padanya yang bertentangan dengan kanon-kanon Kitab Hukum ini”.

Kitab Hukum Kanonik juga dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan konteks masyarakat modern-milenial. Dengan perubahan cepat dalam teknologi, budaya, dan gaya hidup, Kitab Hukum Kanonik perlu mengakomodasi kebutuhan dan harapan umat Katolik dalam konteks zaman yang terus berubah dan mempunyai kebutuhan yang berbeda. Hal ini mencakup upaya untuk memahami dan mengintegrasikan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip moral yang telah ditegakkan oleh Gereja Katolik.

Persoalan yang terjadi sekarang bukan lagi perkembangan membanggakan, melainkan perkembangan yang menumbuhkan nilai lain, yang bertabrakan dengan nilai tradisional. Bagaimana tanggapan Gereja? Gereja sudah lama memberikan tanggapan untuk mencegah sisi negatif yang dibawa oleh perkembangan teknologi komunikasi sosial seperti ini, jauh sebelum alat komunikasi sosial berkembang seperti zaman modern. Lewat beberapa dokumennya, Gereja Universal mengingatkan kembali, apa hakikat komunikasi sosial serta tujuannya yang sejati. Upaya-upaya adaptasi ini penting untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan Kitab Hukum Kanonik dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Dengan memperhatikan perubahan sosial, penegakkan hukum yang efektif, dan adaptasi terhadap konteks modern-milenial, Kitab Hukum Kanonik dapat terus menjadi panduan yang kokoh dan relevan bagi umat Katolik dalam memandu kehidupan spiritual dan moral manusia dalam era modern.

Kitab Hukum Kanonik Memperbaharui Hidup Kristiani

Kitab Hukum Kanonik adalah suatu kebutuhan bagi Gereja, karena melalui norma-normanya, struktur hirarkis dan organisasi Gereja menjadi jelas. Hal ini penting untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada Gereja, terutama dalam pelaksanaan kuasa suci dan sakramen. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan timbal balik antara umat Kristiani atas dasar keadilan dalam cinta kasih, sehingga usaha bersama untuk menghayati hidup kristiani lebih sempurna dapat didukung, diperkuat, dan dimajukan melalui undang-undang kanonik yang didasarkan pada asas yuridis, kanonik, dan teologis yang kukuh.

Kitab Hukum Kanonik dibuat dengan merujuk pada hasil Konsili Vatikan II, sehingga tujuan utamanya adalah untuk memperbaharui hidup Kristiani. Kitab Hukum ini bertujuan terutama untuk menciptakan keteraturan yang memudahkan perkembangan yang teratur dalam kehidupan masyarakat gerejawi serta kehidupan pribadi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kitab Hukum Kanonik, sebagai kumpulan hukum gerejawi dalam Gereja Katolik, berfungsi sebagai pedoman bagi kehidupan dan tata kelola gerejawi. Dengan mendasarkan diri pada ajaran-ajaran agama, Kitab Hukum Kanonik bertujuan untuk memperbaharui dan memperdalam hidup Kristiani dalam konteks gerejawi. Dengan mengatur segala hal mulai dari tata cara ibadah hingga tata tertib administratif, kitab ini menciptakan kerangka kerja yang kokoh untuk praktik keagamaan yang berarti dan terorganisir.

Di dalam Kitab Hukum Kanonik, terdapat tujuan yang jelas untuk memelihara kesatuan dalam Gereja Katolik. Dengan menetapkan prinsip-prinsip yang diterima secara luas dalam iman Katolik, Kitab Hukum Kanonik membantu memastikan bahwa praktek-praktek keagamaan yang berbeda di seluruh dunia tetap sesuai dengan ajaran-ajaran Gereja. Melalui pemeliharaan kesatuan ini, Gereja Katolik dapat menyebarkan ajaran-ajaran agama secara konsisten kepada umatnya di seluruh dunia. Sebagai sarana untuk memastikan keadilan dalam kehidupan gerejawi. Kitab Hukum Kanonik juga menetapkan prosedur dan hukuman untuk tindakan-tindakan yang melanggar ajaran agama atau norma-norma moral yang diakui. Dengan demikian, kitab ini bertujuan untuk menjaga integritas dan moralitas dalam tubuh gerejawi, memberikan kerangka kerja untuk menangani konflik dan masalah dalam lingkup Gereja Katolik serta non-Katolik.

Selain itu, Kitab Hukum Kanonik juga menggarisbawahi pentingnya kedisiplinan dalam hidup Kristiani. Dengan menetapkan aturan-aturan yang jelas dan konsekuensi bagi pelanggarannya, kitab ini bertujuan untuk membentuk umat Katolik menjadi individu-individu yang bertanggung jawab dan taat dalam menjalani ajaran-ajaran agama mereka. Dalam Kanon 208, uraian mulai dengan menandakan persamaan sejati dalam martabat dan kegiatan atas dasar kelahiran baru dalam Kristus. Karena persamaan sejati ini, semua orang beriman mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama mereka laksanakan sesuai tugas khas dan kedudukan masing-masing kelompok yang khusus.

Persamaan dan keanekaragaman anggota Gereja ini digambarkan dalam LG no. 32, “satu umat Allah terpilih: satu iman, satu permandian” (Ef 4:5) sama martabat para anggota karena kelahiran kembali dalam Kristus, sama rahmat putri-putra, sama panggilan kepada kesempurnaan, satu keselamatan, satu harapan dan cinta tak terbagi. Kitab Hukum Kanonik memiliki tujuan yang luas dan kompleks, yang meliputi pemeliharaan kesatuan, keadilan, moralitas, dan kedisiplinan dalam kehidupan gerejawi. Dengan memberikan kerangka kerja yang terorganisir dan berdasarkan pada ajaran-ajaran agama, kitab ini memainkan peran krusial dalam memperbaharui dan memperdalam hidup Kristiani dalam konteks gerejawi.

KESIMPULAN

Kitab Hukum Kanonik memainkan peran sentral dalam membentuk struktur dan fungsi hierarkis di dalam Gereja Katolik dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai tata kelola gerejawi. Kitab ini menetapkan hukum dan aturan yang mengatur peran para pemimpin

gerejawi, seperti uskup dan imam, serta menetapkan hierarki kekuasaan di antara mereka. Pengaturan liturgi juga dipengaruhi oleh Kitab Hukum Kanonik, karena kitab ini menetapkan tata cara liturgi yang harus diikuti oleh para anggota gereja dalam melakukan ibadah. Selain itu, dalam penyelesaian konflik di dalam gereja, Kitab Hukum Kanonik memberikan kerangka kerja yang jelas dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan penyelesaian yang adil dan proporsional.

Kontribusi utama Kitab Hukum Kanonik dalam menjalankan tugas pastoral dan menjaga disiplin gerejawi adalah memberikan pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan para anggota gereja. Kitab ini menetapkan standar moral dan etika yang harus diikuti oleh umat Katolik serta memberikan arahan yang jelas bagi para pemimpin gerejawi dalam menjalankan tugas mereka. Dengan memberikan landasan hukum yang kokoh, Kitab Hukum Kanonik membantu menjaga kesatuan dan kepatuhan dalam tubuh gereja, sehingga mempertahankan ajaran dan tradisi gereja yang telah ada sejak zaman dahulu.

Kitab Hukum Kanonik mempengaruhi hubungan antara Gereja Katolik dengan masyarakat luas melalui pengaturan moral dan etika yang diatur di dalamnya. Kitab ini mencerminkan peran gereja dalam mengatur kehidupan rohani dan moral umat Katolik di tengah-tengah masyarakat yang beragam dengan memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang diperlukan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Kitab Hukum Kanonik membantu menjaga integritas doktrinal gereja dan mempromosikan nilai-nilai moral yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- AI. Andang L. Binawan. *Menelusuri Jiwa Hukum Gereja*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Binawan, Andang. "Tiga Fase Nisbah Hukum Gereja Dengan Hukum Sipil." *Veritas et Justitia* 8, no. 2 (2022): 315–337.
- Josef Boumans. *Telaah Sosio-Pastoral Tentang Manusia*. Ledalero: Celesty Hieronika, 2000.
- Kacak, Meikel Kkaliks Leles. "Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik." *Lex et Societatis* 2, no. 3 (2014): 83–94.
- Konferensi Waligereja Regio Nusa Tenggara. *KATEKISMUS GEREJA KATOLIK*. Flores NTT: Nusa Indah, 2014.
- Lena Meo, Yohanes Wilson Bei. "Relevansi Eklesiologi Communio Konsili Vatikan II Terhadap Hukum Kanonik 1983." *Studia Philosophica et Theologica* 20, no. 2

(2020): 160–176.

Nainggolan, Efidoren L, Muhammad Syahrizal, and Saidi Ramadan Siregar. “Implementasi Algoritma Raita Pada Aplikasi Hukum Kanonik Berbasis Mobile.” *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)* 7, no. 3 (2020): 455.

Paus Yohanes Paulus II. *KITAB HUKUM KANONIK (Codex Iuris Canonice)*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016.

Raharso, ATRT. “Reksa Pastoral Gereja Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Hukum Gereja).” *Seri Filsafat Teologi* 29, no. 28 (2019): 332–355.
<http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/47>.

Randa, Fransiskus, Iwan Triyuwono, Unti Ludigdo, and Eko Ganis Sukoharsono. “Studi Etnografi Akuntabilitas Spiritual Pada Organisasi Gereja Katolik Yang Terinkulturasi Budaya Lokal.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 2, no. April (2011).

Silvester Susianto Budi. *KAMUS KITAB HUKUM KANONIK*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.

Subani, Yohanes. “Pengajaran Kateketik Perspektif Kitab Hukum Kanonik 1983.” *Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi* 9, no. 2 (2017): 1–14.

Tim Komisi Teologi KWI. *GEREJA YANG ADALAH RAGI; Peta Eklesiologi Menurut Dokumen KWI*. Jakarta: OBOR, 2019.

Umat, Bagi, D I Keuskupan, and Yohanes S Lon. “Akan Hukum Kanonik Gereja Katolik” (n.d.): 1–9.

Yese, Blasius Superma, Alfonsus Ara, Sekolah Tinggi, Teologi St, and Yohanes Pematangsiantar. “Pastor Paroki Dan Tanggung Jawabnya Menurut Ketentuan Kitab Hukum Kanonik 1983 Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala Gunungsitoli” 2, no. 1 (2024).

Yustinus Hendro, Romanus Romas, and Silvester Adinuhgra. “Sakramen Rekonsiliasi Sebagai Pembaharuan Hidup Beriman Bagi Umat Di Stasi Santo Petrus Majundre Paroki Santo Paulus Buntok.” *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik* 7, no. 2 (2021): 104–112.